

Social Mapping sebagai Upaya Menjadikan Desa Wisata yang Berkelanjutan di Dusun Wotawati, Gunung Kidul

Social Mapping as a Mitigation for Village Tourism Sustainability in Wotawati, Gunung Kidul

Ade Marup Wirasenjaya ^{1*}, Tabriz Makarim ², Sidiq Ahmadi ², Lucitania Rizky ³

¹ Department of International Relations, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

² Department of International Relations, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

³ Department of International Relations, Universitas Teknologi Yogyakarta

* addewirasenjaya@umy.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan *social services* ini dilakukan untuk melakukan pemetaan sosial (*social mapping*) di Dusun Wotawati, Kabupaten Gunung Kidul, yang sedang berupaya mengembangkan desa wisata. Pemetaan sosial ini diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang berasal dari banyaknya elemen dan pelaku wisata desa. *Social mapping* yang dilakukan berlangsung melalui metode partisipatif dengan menyelenggarakan *focus group discussion* dan *roundtable discussion*. Hasil *social mapping* ini akan dijadikan bahan untuk membuat *road map* atau pemetaan desa wisata agar tren pembukaan desa wisata yang sedang melanda di Indonesia tidak semata-mata mempertimbangkan aspek ekonomi dan bisnis, tetapi juga keberlanjutan ekologi, identitas budaya, dan menciptakan situasi nir-konflik.

Kata kunci — Eko-wisata, Partisipasi Sosial, Pemetaan Sosial, Pariwisata Berkelanjutan

ABSTRACT

This social services activity was carried out to carry out social mapping in Wotawati Village, Gunung Kidul Regency, which is currently trying to develop a community-based tourist destination. The aim of this social mapping is to pinpoint a variety of issues stemming from the diverse components and stakeholders of village tourism. The social mapping carried out took place through a participatory method by holding focus group discussions and roundtable discussions. The results of this social mapping will be used as material for creating a road map or mapping of tourist villages so that the current trend of opening tourist villages in Indonesia does not solely consider economic and business aspects but also ecological sustainability, cultural identity, and creating a non-conflict situation.

Keywords — Eco-tourism, Social Participation, Social Mapping, Sustainable Tourism

1. Pendahuluan

Dusun Wotawati yang terletak di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, dikenal sebagai dusun yang memiliki fenomena unik. Dusun ini dikenal sebagai tempat “matahari datang terlambat”, karena diapit oleh dua bukit yang membuat cahaya matahari pagi tertutup (Pertana, 2022). Dusun ini juga dikenal karena merupakan bekas aliran Bengawan Solo Purba, sehingga banyak menyimpan artefak arkeologis. Melalui modalitas tersebut, dusun yang terletak di ujung Provinsi DIY dan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, berhasil mencanangkan pembentukan Desa Wisata Pucung. Adapun peta wisata Kalurahan Pucung (Wawan, 2022) seperti yang tertera pada gambar di bawah.



Gambar 1. Peta Wisata Kalurahan Pucung

Seiring dengan semakin tingginya tingkat mobilitas masyarakat, kebutuhan untuk menikmati pariwisata terlihat semakin meluas akhir-akhir ini. Ditopang oleh pendapatan ekonomi yang semakin membaik dan dukungan media sosial yang secara amat atraktif menginformasikan dan mengemas tempat-tempat wisata baru di berbagai daerah, mendorong berbagai pihak di tingkat komunitas untuk mencari kekuatan yang dimiliki wilayah mereka untuk dikembangkan menjadi desa wisata.

Pembukaan desa wisata pada akhirnya diyakini akan memberi dampak yang begitu signifikan terhadap perkembangan ekonomi suatu wilayah. Desa wisata dianggap akan memberi pemasukan ekonomi bagi daerah, meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat,

memberi lapangan kerja baru, dan tak kalah penting akan mempromosikan suatu daerah ke khalayak yang lebih luas. Hasil pengamatan Herlianti dan Sanjaya (2022) mengungkapkan beberapa dampak positif dari munculnya fenomena wisata berbasis komunitas. Selain dari sisi ekonomi, dampak positif wisata berbasis komunitas juga muncul dari semakin pedulinya masyarakat akan budaya dan lingkungan sekitar. Selain itu, juga mendorong partisipasi masyarakat untuk menjaga wilayah mereka (Herlianti & Sanjaya, 2022).

Kegairahan untuk membuka daerah wisata yang menekankan aspek keberlanjutan memerlukan kerja sama berkelanjutan antara satu pihak dengan pihak lainnya guna menciptakan program yang efektif dan efisien di bidang pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata berkelanjutan (Suhaimi et al., 2024). Tujuannya adalah untuk menciptakan konsep destinasi wisata yang menghasilkan produk unggulan pada suatu desa yang berbeda dengan desa lainnya. Produk unggulan tersebut diharapkan tidak hanya berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Hanya saja, pemerintah sering kali menganggap bahwa sumber daya masyarakat lokal belum siap mengelola wisata alamnya secara mandiri, sehingga pemberdayaan masyarakat lokal pun terkadang tidak disertai dengan program pembinaan, penyuluhan, dan pendampingan (Wijaya & Sudarmawan, 2019).

Isu keberlanjutan (*sustainability*) dalam pengelolaan desa wisata menjadi perhatian banyak pihak di tengah semangat masyarakat untuk membuka zona-zona wisata baru. Janji ekonomi dari pembukaan desa wisata nampaknya mulai menghadapi sejumlah kenyataan akibat adanya fenomena “bumerang turisme” yang melanda sejumlah tempat. Tidak hanya dalam konteks lokal dan nasional, namun gelombang gerakan anti-turis cukup artikulatif melanda beberapa destinasi unggulan di dunia, seperti Barcelona, Amsterdam, Venesia, dan juga Berlin. Di Spanyol misalnya, gelombang anti-turis bahkan hingga ke level yang agak ekstrem dengan meminta pulang para turis yang berkunjung ke kota Barcelona. Mereka meneriakkan slogan “go home” untuk meminta para turis pulang ke negara asal karena dianggap

telah membuat kota semakin padat, mahal, dan lingkungan rusak (The Economic Times, 2024).

Dalam konteks meluasnya isu “bumerang turisme” itulah yang menurut penulis perlu upaya untuk melakukan pemetaan sosial (*social mapping*). Pemetaan sosial merupakan upaya mitigasi, antisipasi, serta penguatan sejumlah elemen yang menjadi modalitas wisata desa. Pemetaan sosial juga diperlukan untuk meminimalisasi jatuhnya wisata menjadi komoditas baru yang hanya memikirkan aspek keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan keberlanjutan kultur, kehidupan sosial, dan ekologi desa.

Di Dusun Wotawati, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, promosi wisatanya masih perlu untuk ditingkatkan, sehingga kegiatan pengabdian yang dilakukan mempunyai hasil akhir berupa pemetaan sosial (*social mapping*). Pemetaan sosial merupakan upaya penting sebagai bagian dari mitigasi pada program pengembangan desa wisata yang akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh berbagai daerah yang memiliki kapital berupa keindahan, keunikan, serta nilai jual. Keinginan mengembangkan desa wisata sering kali hanya didorong oleh semangat mereplikasi daerah lain dan atas pertimbangan-pertimbangan pragmatis, seperti mendapat sumber pendapatan baru bagi kas desa. Sementara itu, daya dukung kultural, sosial, dan kelembagaannya tidak mendapat perhatian. Akibatnya, pengembangan desa wisata tidak jarang justru menyeret pada komodifikasi alam dan kultur desa. Kegiatan ini sendiri diarahkan pada upaya awal berupa identifikasi atas ekses sosial-budaya yang biasanya lahir dari fenomena desa wisata. Melalui kegiatan interaktif berupa FGD (*Focus Group Discussion*) serta sarasehan, pengabdian ini mencoba mengumpulkan sekaligus mengidentifikasi suara-suara dan aspirasi warga desa dengan memberikan berbagai pemahaman penting tentang perlunya melihat banyaknya aspek yang ada. Pada akhirnya, seperti yang ditulis oleh Kesbangpol DIY (2022), bahwa hal tersebut ditujukan agar pengembangan desa wisata dapat berkelanjutan, nir-konflik, dan memberi kemaslahatan bagi perkembangan sosial, kebudayaan, dan lingkungan masyarakat desa.

Di tengah menguatnya mobilitas manusia dan munculnya gejala desa wisata pada berbagai wilayah, eksplorasi terhadap tempat-tempat eksotis yang memiliki keunikan budaya dipastikan akan terus mengalami pertumbuhan. Pada satu sisi, munculnya wilayah-wilayah baru sebagai destinasi wisata mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat berupa munculnya sumber-sumber ekonomi baru. Bagaimanapun, jumlah kunjungan wisata juga akan memberikan dampak eksplisit terhadap pertumbuhan suatu kawasan serta memberikan peluang bagi terbukanya sumber ekonomi. Namun, di sisi lain, penerima manfaatnya justru tidak selalu berasal dari masyarakat tempat lokasi wisata itu berada. Salah satu watak pelaku ekonomi dalam era globalisasi adalah oportunis dan mampu melakukan penetrasi yang masif ke berbagai daerah. Sementara itu, semangat untuk menghidupkan desa wisata sering kali harus ditebus dengan terancamnya aspek ekologi, marginalisasi budaya lokal, dan hilangnya daya dukung lingkungan. Hal ini memerlukan antisipasi yang terukur dan berjangka panjang supaya fenomena *eco-tourism* tetap menjaga keseimbangan tiga pilar penting, yaitu pertumbuhan ekonomi, identitas budaya, dan sustainability lingkungan (Nirwandar, 2022).

Dalam perkembangannya, upaya melakukan pendidikan yang memberi kesadaran tentang menjaga keselarasan lingkungan dan capaian ekonomi sangat penting untuk dilakukan. Masyarakat yang berada di daerah wisata yang memiliki modal alam harus menjadi penerima manfaat terbesar dari munculnya arus dan tren *eco-tourism*. Oleh karenanya, pendidikan berguna untuk membekali masyarakat serta menjadi upaya pemberdayaan demi membangun kesadaran dan pengetahuan bagi perkembangan desa wisata yang memerlukan keterlibatan intens dan sistematis dari perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan model pengembangan desa wisata yang sudah ada di kawasan lain, ditambah dengan bekal teknis berupa pemberdayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan sentra ekonomi, yang mana diharapkan masyarakat mampu menerima keuntungan terbesar dari adanya fenomena ini (Immaniyar & Farida, 2021). Di lain pihak,



upaya membentuk komunitas yang siap melakukan transisi desa juga sangat diperlukan.

Tidak banyak upaya yang mencoba melakukan pemetaan sosial atau *social mapping* dari kecenderungan pengembangan desa sebagai destinasi turis. Padahal, pada level global, gelombang gerakan anti-turis sedang melanda beberapa kota, seperti Barcelona, Amsterdam, Italia, dan Kyoto, sebagai bentuk perlawanan atas komodifikasi kota yang dianggap terlalu melayani kepentingan para pelancong dibandingkan menyelamatkan budaya dan daya dukung lingkungan suatu daerah (Apriska et al., 2022). Di Indonesia, fenomena gerakan yang juga melakukan protes terhadap turisme berlangsung dalam gerakan “For Bali” yang menolak reklamasi di Pulau Bali (Pramestisari, 2022).

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi bahwa kurangnya pengetahuan para pelaku usaha desa wisata menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pengembangan desa wisata (Carolina, 2018). Menurut Dewa et al. (2018), keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kepercayaan diri masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya di wilayah mereka sekaligus kurangnya pelatihan dan pengetahuan menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, observasi yang dilakukan oleh tim pengabdian bertujuan untuk memberikan solusi melalui pemetaan sosial yang diharapkan dapat mengembangkan potensi desa. Dalam hal ini, penting untuk mengetahui profesi masyarakat yang ada di wilayah desa wisata. Adapun mayoritas perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Wotawati, mulai dari nelayan, petani/pedagang, pegawai negeri dan swasta, hingga pengelola kelompok eko-wisata yang dikenal dengan sebutan “PokDarWis” atau Kelompok Sadar Wisata (Bappeda DIY, 2022).

Pengembangan desa wisata sendiri harus dilihat dalam konteks yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek ekonomi maupun aspek lingkungannya (Wiwin, 2018). Secara implisit, hal ini berarti tidak hanya dilakukan dengan mengandalkan sumber daya alam maupun budayanya saja, tetapi juga dengan memperkuat kapasitas masyarakat lokal atau sumber daya manusia dalam mengelola destinasi wisata yang berkelanjutan. Peran serta dari perguruan tinggi yang relevan dan adanya

kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat lokal menjadi sangat penting guna membekali masyarakat desa dengan pengetahuan yang tepat serta keterampilan yang dibutuhkan. Jadi, *social mapping* yang dilakukan pada akhirnya bertujuan untuk melihat implikasi yang berpotensi timbul dari berbagai isu pembangunan dalam arena sosial, seperti melihat bagaimana rentannya situasi sosial di Yogyakarta yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan yang ada, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

2. Metodologi

Pengabdian ini dilakukan di Dusun Wotawati dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang mengutamakan keterlibatan aktif dari seluruh pihak yang bersangkutan. Metode yang digunakan adalah melalui model *roundtable discussion* dan *focus group discussion*, di mana para pelaku wisata pada level paling bawah, yakni dusun dan desa, dijadikan sebagai narasumber yang setara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan aspirasi dari mereka yang berada pada garis depan pengelolaan wisata, sehingga perspektif dan pengalamannya dapat diintegrasikan ke proses perencanaan dan pengembangan. Pengabdian ini juga dilakukan dengan menggunakan “Skema Pentahelix”, yang mencakup lima elemen utama dalam pengembangan desa wisata, yaitu pemerintah, akademisi, pebisnis, komunitas, dan media. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat, sehingga pengembangan desa wisata dapat dilakukan secara holistik dan berkelanjutan. Namun, para narasumber dari dusun dan desa hanya merupakan satu dari lima elemen ini, yang mana posisinya sebagai bagian dari elemen pengembangan wisata desa. Adapun “Skema Pentahelix” (Vani et al., 2020) seperti yang tertera pada gambar di bawah.



Gambar 2. Skema Pentahelix

Cara ini ditempuh mengingat tujuan dari pengabdian ini adalah melakukan *social mapping* atau pemetaan sosial dalam rangka memahami harapan dan perspektif penerima manfaat terbesar dari wisata, yakni warga desa. Dalam cara kerja *social mapping*, masing-masing elemen yang terkait dengan desa wisata dapat mengajukan berbagai macam ide maupun gagasan sebelum dibentuk sebuah “road map” wisata desa yang lebih jelas dan terlembaga. Dengan demikian, proses perencanaan wisata desa tidak hanya *top-down*, tetapi juga *bottom-up*, yang mana mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat. Pendekatan partisipatif yang dilakukan dimulai dengan mengidentifikasi seluruh pemangku kepentingan yang relevan. Selanjutnya, dilakukan *roundtable discussion* dan *focus group discussion* yang melibatkan seluruh peserta diskusi.

Tahap 1. Identifikasi Pemangku Kepentingan
Aktivitas: Mengidentifikasi pelaku kunci dari semua elemen untuk kolaborasi yang efektif Tujuan: Mengidentifikasi seluruh pemangku kepentingan yang relevan dan terlibat dalam pengembangan pariwisata Pelaksanaan: Januari 2024
Tahap 2. Roundtable Discussions
Aktivitas: Memfasilitasi diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk mengumpulkan informasi tentang tantangan desa dan pariwisata Tujuan: Mengumpulkan wawasan yang komprehensif mengenai kondisi desa saat ini serta potensi pariwisatanya Pelaksanaan: 6 Maret 2024
Tahap 3. Focus Group Discussions
Aktivitas: Melakukan FGD dengan berbagai pemangku kepentingan lokal guna mendalami lebih jauh isu-isu terkait pariwisata Tujuan: Menjelajahi isu dan perspektif spesifik secara mendalam Pelaksanaan: 6 Maret 2024
Tahap 4. Tinjauan dan Umpan Balik
Aktivitas: Membagikan rancangan <i>road map</i> dengan para pemangku kepentingan untuk mengumpulkan masukan dan melakukan revisi yang diperlukan

Tujuan: Menyempurnakan <i>road map</i> berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan Pelaksanaan: 6 Maret 2024
Tahap 5. Perencanaan Implementasi
Aktivitas: Mengembangkan rencana terperinci untuk implementasi <i>road map</i> , termasuk alokasi sumber daya dan <i>timeline</i> Tujuan: Merencanakan pelaksanaan program pengembangan pariwisata Pelaksanaan: 6 Maret 2024

Tabel 1. Implementasi Aktivitas

Dalam sesi diskusi yang dilakukan pada 6 Maret 2024, seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara sekaligus menyampaikan pandangan mereka terkait topik yang dibahas. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwasanya seluruh suara dapat didengar oleh satu sama lain. Selama proses ini, fasilitator pengabdian bertugas membantu jalannya diskusi agar tetap produktif dan memastikan bahwa isu yang dibawa berhasil mendapat perhatian yang cukup dari seluruh peserta diskusi. Selain itu, fasilitator dari tim pengabdian juga memiliki peran penting yang bertugas menganalisis data yang diperoleh dari diskusi serta merumuskan rekomendasi berdasarkan temuan yang didapatkan, sehingga hasil dari *social mapping* ini memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Pada akhirnya, partisipasi aktif dari narasumber selama sesi diskusi dan pengambilan keputusan menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa pengembangan wisata desa telah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Keterlibatan komunitas sendiri juga penting guna membangun rasa tanggung jawab atas kepemilikan terhadap proyek yang hendak dikembangkan. Melalui pendekatan partisipatif dan skema yang diberlakukan, diharapkan pengabdian ini dapat menghasilkan *road map* bagi desa wisata yang tidak hanya mencakup rencana jangka pendek, tetapi juga strategi jangka panjang demi memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan berpotensi memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang seluruhnya mempunyai sifat berkelanjutan bagi masyarakat setempat.



Gambar 3. Lokasi Dusun Wotawati Diapit Dua Bukit Tinggi

3. Pembahasan

Dari proses *roundtable discussion* dan *focus group discussion* bersama para pemangku wisata di Dusun Wotawati, didapat beberapa temuan penting yang dijadikan landasan dalam pengembangan desa wisata. Temuan-temuan terkait menggarisbawahi berbagai aspek kritis yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya menjadikan Dusun Wotawati sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan dan memiliki daya saing.



Gambar 4. Sesi Pemaparan Materi dan Diskusi

Pertama, dari sisi “nilai ekologis dan budaya”. Para partisipan menyepakati bahwa Dusun Wotawati memiliki sebuah “selling point” untuk dijadikan sebagai *brand* wisata mereka, yakni “Dusun Matahari Datang Terlambat”. Dusun ini dikenal dengan fenomena matahari yang terbit lebih lambat dibandingkan daerah sekitarnya, karena letaknya berada di antara dua bukit yang tinggi, sehingga fenomena ini berpotensi memberikan keunikan tersendiri yang dapat menarik wisatawan. Selain itu, dusun ini juga dikenal dengan “Dusun di Bekas Bengawan Solo Purba”, yang mana keberadaan bekas aliran sungai Bengawan Solo Purba di daerah ini

menjadi aset historis sekaligus arkeologis yang sangat berharga, ditambah adanya penemuan artefak-artefak yang menjadi daya tarik bagi wisatawan yang menyukai sejarah dan budaya. Keduanya menjadi modal yang sama-sama disadari oleh warga di Dusun Wotawati dan mereka sangat percaya bahwa dua identitas tersebut dapat menjadi elemen distingtif dusun dan desa mereka dibandingkan kawasan wisata lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kedua, dari sisi “infrastruktur sosial dan budaya”. Mayoritas partisipan berpendapat bahwa Dusun Wotawati belum memiliki cukup kesiapan dalam infrastruktur sosial dan budaya. Meskipun memiliki modal sosial dan budaya yang cukup kuat, kenyataannya Dusun Wotawati masih menghadapi tantangan besar dalam kesiapan tersebut. Masyarakat di sana mayoritas terdiri dari kalangan tua dan anak-anak, sementara generasi muda banyak yang merantau ke kota untuk bekerja, sehingga terjadi kekosongan dalam hal pelaku budaya yang sekiranya mampu menjaga serta memelihara warisan budaya setempat. Bahkan, tidak adanya pelaku budaya muda yang tinggal di sana juga mengakibatkan keterbatasan dalam hal pengembangan dan pelestarian budaya lokal yang menjadi salah satu dari banyaknya daya tarik wisata yang ada. Oleh karenanya, diperlukan strategi khusus guna menarik kembali generasi muda dan kemudian melibatkan mereka secara aktif dalam berbagai kegiatan budaya dan pariwisata.

Ketiga, dari sisi “infrastruktur pendukung”, seperti jalan, lingkungan, dan lahan wisata. Pada dasarnya, ketiganya yang mampu menyediakan zona untuk berkunjung dan berkumpul bagi para pendatang. Akan tetapi, ketiganya juga belum sepenuhnya siap. Berdasarkan hasil diskusi, terdapat beberapa hal yang didapatkan. Pertama, infrastruktur jalan yang ada belum sepenuhnya mendukung aksesibilitas bagi wisatawan. Kedua, lingkungan sekitar Dusun Wotawati juga memerlukan penataan yang lebih baik agar dapat menyediakan zona nyaman bagi para pengunjung. Terakhir, lahan wisata masih harus dikelola dengan baik demi menciptakan ruang-ruang yang menarik bagi wisatawan.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah setempat, Estu Dwiyono, yang menyatakan bahwa penerima dana keistimewaan

untuk pengembangan wisata. Namun, sampai pengabdian ini dilakukan para partisipan masih belum mendapatkan gambaran yang jelas tentang rute dan peta jalan daerah ini sebagai daerah tujuan wisata. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dan koordinasi antarpihak terkait masih perlu ditingkatkan supaya dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Keempat, dari sisi “keberlanjutan lingkungan dan budaya”. Hampir seluruh partisipan sepakat bahwa belum ada kesiapan dan daya dukung lingkungan dari masyarakat untuk dijadikan desa wisata. Para partisipan khawatir jika pada akhirnya yang akan mendapatkan peluang dan keuntungan adalah para pelaku usaha yang berasal dari luar Dusun Wotawati, yang kemudian membuat masyarakat setempat hanya akan menjadi penonton. Oleh karenanya, kesadaran mengenai pentingnya menjaga ekosistem dan warisan budaya masih perlu ditingkatkan.

Untuk mengatasi permasalahan terkait, maka diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan seluruh elemen “pentahelix”. Mulai dari pemerintah yang harus berperan aktif dalam memberikan kebijakan yang mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, kemudian akademisi yang juga dapat melakukan kegiatan pendampingan seperti pengabdian kepada masyarakat lokal, lalu pebisnis yang dilibatkan melalui investasinya sebagai dukungan finansial bagi manajemen pariwisata. Bahkan, komunitas lokal yang ada di dalam desa tetap harus dilibatkan secara aktif pada seluruh rangkaian atau tahapan pengembangan wisata desa, hingga adanya media yang berperan penting guna menyebarkan informasi sekaligus berpotensi meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pengembangan wisata yang berkelanjutan.

Menurut (Jimu, 2008), memang betul bahwasanya pengembangan desa wisata tidak selalu berkaitan dengan masalah teknis seperti ekonomi dan infrastruktur saja, karena sejatinya desa wisata perlu mencerminkan kesadaran masyarakat setempat atas identitas diri dari desa tersebut. Jadi, komunikasi yang efektif dan efisien akan menghasilkan peran aktif dari komunitas lokal yang mampu meningkatkan promosi dari desa wisata, di mana mereka yang akan membuat rancangan konsep promosi desa

wisata yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat setempat (Yanti & Chasanah, 2022).

4. Kesimpulan

Pengabdian ini telah melakukan identifikasi dan pemetaan sosial terkait dengan dijadikannya Dusun Wotawati sebagai daerah tujuan wisata. Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan *social mapping* ini adalah belum adanya kesamaan visi antara pelaku dengan penerima manfaat wisata, sehingga masih diperlukan upaya pendalaman lebih lanjut yang melibatkan berbagai elemen *pentahelix* yang lain, seperti pemerintah, perguruan tinggi, dan para investor, demi memastikan kesiapan Dusun Wotawati dalam mengembangkan daerahnya menjadi tujuan wisata yang memiliki identitas serta tetap menjaga keberlanjutan ekologi dan nir-konflik. Harapannya, penelitian selanjutnya dapat terus menjamin keterlibatan aktif masyarakat lokal pada setiap tahapan pengembangan pariwisata desa, karena hal ini penting demi terealisasinya aspirasi masyarakat lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat terakomodasi dengan baik. Selain itu, perlu juga untuk dilakukan studi kasus komparatif dengan desa wisata lain yang berhasil mengembangkan potensi wisata dalam desanya berdasarkan wawasan yang diadopsi dan telah disesuaikan dengan kondisi desa setempat.

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami sampaikan kepada pihak LP3M UMY yang memberikan dukungan untuk kegiatan ini. Juga kepada Lurah Girisubo yang memfasilitasi dan memberikan dukungan bagi kegiatan ini.

6. Daftar Pustaka

- [1] Apriska, N. K. S., Raka Dalem, A. A. G., & Suartini, N. M. (2022). Interpretasi Ekowisata Oleh Pramuwisata (Pemandu Wisata) Pada Daya Tarik Wisata Kupu-Kupu Di Bali. *Simbiosis*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.24843/jsimbiosis.2022.v10.i01.p01>
- [2] Bappeda DIY. (2022). *Jumlah Desa Wisata dan Pokdarwis*. Bappeda DIY. https://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/cetak/211-desawisata-dan-pokdarwis?id_skpd=23



- [3] Carolina, A. (2018). Pengembangan Eco Edu Wisata Mangrove di Kawasan Hutan Mangrove Wonorejo Dengan Pendekatan Gender. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*.
- [4] Dewa, A. L., Ratwianingsih, L., & Mafruhah, I. (2018). Pengembangan Pariwisata Jawa Tengah Berbasis Ecology Marine Tourism. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 16(1), 46–58. <https://doi.org/10.36762/litbangjateng.v16i1.746>
- [5] Herlianti, E. V., & Sanjaya, R. B. (2022). Dampak Positif Pariwisata Terhadap Budaya, Ekonomi, Dan Lingkungan Di Kasepuhan Cipta Mulya. *Kritis*, 31(2), 132–149. <https://doi.org/10.24246/kritis.v31i2p132-149>
- [6] Immaniyar, A. A., & Farida, R. (2021). Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) di Hutan Mangrove Pancer Cengkong, Trenggalek. *Jurnal Planoeath*, VI No. I(I), 56–61.
- [7] Jimu, I. M. (2008). Community development: A cross-examination of theory and practice using experiences in rural Malawi. *Africa Development*, 33(2), 23–35. <https://doi.org/10.4314/ad.v33i2.57277>
- [8] Kesbangpol DIY. (2022). Mengembangkan Wisata yang Nir-Konflik (laporan tim ahli, tidak dipublikasikan).
- [9] Nirwandar, S. (2022). *Ecotourism in Indonesia*. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4488Nirwandar.pdf>
- [10] Pertana, P. R. (2022). *Fenomena Unik Matahari di Wotawati Gunungkidul, Pagi Telat-Malam Lebih Cepat*. Detik Jateng. <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6001665/fenomena-unik-matahari-di-wotawati-gunungkidul-pagi-telat-malam-lebih-cepat>
- [11] Pramestisari, N. A. S. (2022). Membaca Industri Pariwisata Bali Melalui Gerakan Sosial Kontra Hegemoni ForBALI. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2(1), 47–64. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.47-64>
- [12] Suhaimi, S. N., Putri, T. A., Harahap, A., & Furqan, A. (2024). Analisis Penerapan Community Based Tourism (Cbt) Di Desa Wisata Mekarsari, Kabupaten Bandung. *Jurnal Industri Pariwisata*, 6(2), 160–173. <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v6i2.1555>
- [13] The Economic Times. (2024). “Go home”: Anti-tourism movement gains momentum in Spain. The Economic Times. <https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/go-home-anti-tourism-movement-gains-momentum-in-spain/articleshow/109392288.cms?from=mdr>
- [14] Vani, R. V., Priscilia, S. O., & Adianto, A. (2020). Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1), 63–70. <https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.3361>
- [15] Wawan. (2022). *Peta Sebaran Wisata Di Kalurahan Pucung*. <https://desapucung.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/2050-Peta-Sebaran-Wisata-Di-Kalurahan-Pucung->
- [16] Wijaya, N. S., & Sudarmawan, I. W. E. (2019). Community Based Tourism (Cbt) Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Dtm Ceking Desa Pekraman Tegallalang. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 10(1), 77–98. <https://doi.org/10.22334/jihm.v10i1.162>
- [17] Wiwin, I. W. (2018). Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Bali I Wayan Wiwin. *Pariwisata Budaya*, 3(1), 69–75.
- [18] Yanti, D. E. S., & Chasanah, I. N. (2022). Desa Wisata Sebagai Penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Menuju Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i1.3594>

